

## ANALISIS LATAR BELAKANG KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

I Kadek Yudiana<sup>1</sup>, Sahru Romadloni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email : [ikadekyudiana@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:ikadekyudiana@untag-banyuwangi.ac.id)<sup>1</sup>, [sahru.romadloni@untag-banyuwangi.ac.id](mailto:sahru.romadloni@untag-banyuwangi.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Desa patoman merupakan sebuah desa yang terletak di Ujung Timur Pulau Jawa yang terdiri dari berbagai agama dan etnis. Penduduk desa Patoman sangat majemuk dari 5.246 terbagi menjadi 4.084 jiwa atau 82.3 %, beragama Hindu mencapai 860 jiwa atau 17.3 % dan sisanya beragama Kristen sebanyak 8 jiwa, beragama Buda 7 Jiwa. Ditengah ketegangan antar suku, agama, ras, dan etnik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia saat ini sangat berbeda dengan Desa Patoman Mampu menjaga Harmonisasi antar suku, rusa, dan agama. Dalam penelitian ini mencoba menganalisis dengan kritis latar belakang kerukunan antar umat beragama yang ada di desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif analitik kritis dengan tahapan penelitian meliputi penentuan lokasi penelitian, metode penentuan informan, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengujian keabsahan data, dan metode analisis data. Hasil dalam penelitian menunjukkan yang menjadi latar belakang kerukunan antar umat beragama di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi antara lain: 1) Latar belakang Histori; 2) Perkawinan; 3) Ideologi Pancasila; 4) Perspektif ajaran masing-masing agama yang ada di Desa Patoman.

**Kata Kunci:** *Kerukunan, Umat Beragama, Desa Patoman*

### PENDAHULUAN

Kemultikulturasi bangsa Indonesia merupakan kekayaan budaya yang membanggakan, tetapi pada sisi lainnya juga mengandung potensi masalah (Suratman, dkk, 2013: 165). Menurut Siswomiharjo (dalam Pageh, dkk, 2013: 4), juga menjelaskan bahwa terkait dengan kesepakatan hidup bersama antar etnik, agama dan budaya, bagi Indonesia sebagai bangsa yang pluralis sering menimbulkan gejala-gejala yang mengarah pada disintegrasi bangsa". Tumagor, dkk (2010: 127) juga menguraikan secara jelas mengenai potensi konflik yang dapat terjadi di Indonesia, yakni:

"Masyarakat majemuk yang tersusun oleh keragaman kelompok etnik (*ethnic group*) beserta tradisi budayanya itu, tidak hanya berpeluang menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang kuat di masa mendatang, tetapi juga mendorong timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam sendi-sendi integrasi negara bangsa (*nation state*), jika dinamika kemajemukan sosial budaya itu tidak dapat dikelola dengan baik".

Bahkan, jika ditinjau dari aspek sejarah, potensi konflik tersebut sudah tergambar sejak jaman Hindia Belanda, seperti yang dikemukakan oleh Samuel (2010: 41), yaitu "masyarakat Hindia sudah dipecah melalui rekayasa identitas primordial para penduduknya". Oleh karena itu, potensi konflik yang ada di Indonesia merupakan "...warisan dari proses kolonisasi yang begitu panjang" meminjam pendapat Greertz

(dalam Samuel, 2010: 42). Pendapat tersebut nampaknya juga berbanding lurus dengan penjelasan Rangkuti dan Hasibuan (2002: 131), yakni "...berbagai suku bangsa di Nusantara ini amat mudah diadu domba oleh pemerintah Kolonial Belanda". Perbedaan etnis dan agama di Indonesia memang dengan sengaja dipupuk melalui strategi klasik bernama "*divide et impera*" or "*divide and conquer*" atau politik adu domba (Samuel, 2010: 43).

Beberapa contoh konflik sampai tahun 2016 dapat digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan keretakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya: (1) Pada tanggal 13 Oktober 2015, adanya intoleransi terhadap umat Kristen yang berujung pada pembakaran Gereja dan menewaskan 1 (satu) orang di Desa Suka Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. (2) Pada tanggal 17 Juli 2015, adanya kekerasan dan intoleransi terhadap umat muslim pada saat merayakan Idul Fitri yang berujung pada pembakaran Mesjid, kios dan rumah penduduk di Desa Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. (3) Pada tanggal 28 Oktober 2012, terjadi kekerasan dan diskriminasi/intoleransi yang berujung pada bentrokan antara suku Lampung dan warga suku Bali di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. (4) Kemudian, contoh kasus serangan terorisme pada tanggal 14 Januari 2016, yang ditandai dengan serentetan peristiwa berupa enam ledakan, dan juga penembakan di daerah Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berbicara mengenai diskriminasi, intoleransi dan konflik antar/intern etik, ras, dan agama di Indonesia tentu bukanlah hal yang baru di negeri ini. Akan tetapi, adanya daerah-daerah di Indonesia yang tetap mampu menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama, antarsuku, mampu berdiri di atas segala perbedaan, tentunya merupakan contoh langka yang jarang bisa kita saksikan di panggung megah teater demokrasi. Padahal, perbedaan dan kemultikulturalan tersebut merupakan landasan fundamental terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain tentunya didasari oleh rasa senasib dan sepenanggungan bekas jajahan Hindia Belanda (Pageh, dkk, 2013: 17).

Salah satu contoh relevan yang dapat digunakan sebagai contoh aktualisasi hubungan harmonis kerukunan antaragama dan suku di Indonesia adalah Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi. Desa patoman merupakan sebuah desa yang terletak di Ujung Timur Pulau Jawa yang terdiri dari berbagai agama dan etnis. Penduduk desa Patoman sangat majemuk dari 5.246 terbagi menjadi 4.084 jiwa atau 82.3 %, beragama Hindu mencapai 860 jiwa atau 17.3 % dan sisanya beragama Kristen sebanyak 8 jiwa, beragama Buda 7 Jiwa. Ditengah ketegangan antar suku, agama, ras, dan etnik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia saat ini sangat berbeda dengan Desa Patoman Mampu menjaga Harmonisasi antar suku, rusa, dan agama.

Dalam hal menjalankan kebebasan beribadat di Desa Patoman juga telah ada Masjid sebanyak 4 Buah dan 37 buah langgar/mushola yang keberadaannya tersebar di empat dusun, dan 2 (dua) buah Pura yang berada di Dusun Patoman Tengah sebagai tempat peribadatan pemeluk agama Hindu. Sedangkan untuk agama Kristen dan Budha tempat ibadahnya ada di luar desa. Kerukunan antar umat beragama maupun antar suku di Desa Patoman sudah terjalin harmonis, satu sama yang lain saling menghormati sehingga tercipta kondisi yang aman, tentram dan damai. Selain itu, kerukunan antar suku di Desa Patoman sudah mampu membaur satu dengan yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kejadian-kejadian yang berbau sara hingga bulan Desember 2017.

Perbedaan yang ada pada masyarakat di Desa Patoman tidaklah menjadikan mereka hidup dalam ketegangan yang menimbulkan konflik, seperti konflik-konflik yang sering terjadi dewasa ini yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama, etnis, suku dan kelompok. Namun, kehidupan mereka justru sangat harmonis, bisa hidup secara berdampingan, dan sangat menjunjung toleransi dan kerukunan antar agama dan suku. Setiap masyarakat bukan hanya mengakui keberadaan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan dari setiap masing-masing penganut agama yang ada melalui interaksi positif dalam lingkungan masyarakat yang plural dan mejemuk.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus (*case study*) tunggal (Sutopo, 2006: 136). Adapun tahapan penelitian ini terdiri dari

### **(1) Metode Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yakni pemilihan informan atau sampel yang sesuai dengan tujuan peneliti (Mulyana, 2004: 187; Sugiyono, 2009: 216). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang objek penelitian, yakni kepala desa, tetua/sesepuh desa, pemimpin keagamaan, pemimpin suku, masyarakat umum dan lain sebagainya.

### **(2) Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan beberapa teknik, yaitu 1) Teknik observasi (*observation*). Adapun dalam penelitian ini yang diobservasi adalah tempat atau lingkungan sosial budaya masyarakat di Desa Patoman, benda-benda keagamaan di Desa Patoman, perilaku masyarakat di Desa Patoman dalam menjaga kerukunan antar/intern umat beragama, dan keadaan generasi muda dalam memaknai kerukunan antar umat beragama di Desa Patoman. 2) Teknik wawancara (*interview*). Adapun aspek-aspek yang akan diwawancarai antara lain menyangkut latar belakang masyarakat tetap menjaga kerukunan antar umat beragama pada masyarakat multikultur di Desa Patoman. 3) Teknik Studi Dokumen Dalam penelitian ini, seperti majalah, Koran, hasil penelitian, artikel dan buku-buku yang ada kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama pada masyarakat multikultur di Desa Patoman.

### **(3) Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen (Sugiyono, 2009: 222; Nasution, 1996: 54). Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009: 222). Peneliti dalam pengumpulan data juga menggunakan beberapa instrumen penelitian antara lain: (1) pedoman observasi, (3) *taperecorder*, (4) buku catatan.

### **(4) Metode Pengujian Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang terdiri dari: 1) Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menguji keabsahan sumber data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, maupun observasi. 2) Triangulasi metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan metode yang berbeda. Data sejenis yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dibandingkan dan ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya

(Sutopo, 2006: 95). 3) Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding (Bungin, 2009: 257).

### **(5) Metode Analisis Data**

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2009: 244). Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah teknik analisis interaktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan selalu diinteraksikan atau dibandingkan dengan unit data yang lain. Menurut Nasution (1996: 129) dalam aktivitas menganalisis data dalam penelitian kualitatif terdapat langkah-langkah umum yang harus diikuti yakni, reduksi data (*data reduction*), display data (*data display*), dan mengambil kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifikasi*).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Latar Belakang Sejarah**

Faktor sejarah tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menganalisis latar belakang kerukunan antar umat beragama di Desa Patoman. Kata “Patoman” berasal dari Bahasa Jawa yaitu “Patemon” yang berarti pertemuan (Swastiko, 2017: CHW 05). Dalam perkembangan selanjutnya kata *Patemon* berubah menjadi Patoman dalam hal pengucapannya. Yang dimaksud pertemuan dalam hal ini adalah pertemuan dari beberapa etnis yang ditempatkan menjadi satu sehingga membentuk Desa Patoman.

Adapun etnis yang dipertemukan pada desa Patoman meliputi etnis Jawa, Bali, Madura, dan Osing, serta ada beberapa dari etnis Cina. Keberadaan desa Patoman berawal pada masa kekuasaan VOC di bumi Blambangan. Sekitar pertengahan abad ke-18 oleh VOC suku Bali yang berada di kampung Bali dipindahkan ke sebuah hutan di daerah selatan yang nanti menjadi cikal bakal Desa Patoman (Widado, 2017: CHW 07). Tidak hanya suku bali yang dipindahkan keselatan tetapi juga etnis lain, seperti Jawa, Madura, dan Osing.

Etnis Bali sebenarnya sudah ada di Blambangan (Banyuwangi) sudah sangat lama yaitu pada masa Blambangan beradai di bawah kekuasaan raja-raja Bali (Buleleng dan Menguwu). Keberadaan orang-orang Bali di Blambangan dalam rangka mempertahankan hegemoninya dan menjadikan Blambangan sebagai banteng pertahanan untuk membendung masuknya Islam. Pada masa ini orang-orang Bali menempati daerah kampung Bali (Kota Banyuwangi sekarang). Dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Bali ini di pindahkan keselatan untuk membat hutan yang kemudian menjadi Desa Patoman.

Dengan demikian factor sejarah menjadi salah satu factor latar belakang kerukunan antar umat beragama di Desa Patoman.

### **2. Perkawinan**

Selain latar belakang sejarah, salah satu yang menjadi latar belakang kerukunan antar umat beragama di Desa Patoman adalah perkawinan. Perkawinan campuran sering diistilahkan dengan amalgamasi. Amalgamasi secara garis besar adalah perkawinan beda

kebudayaan atau campuran. Amalgamasi berarti perbauran biologis dua kelompok manusia yang masing-masing memiliki ciri fisik yang berbeda, sehingga keduanya menjadi satu rumpun (Kardiyan, 2015: 1-14).

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia (Nikmah, Hilda Y., 2015: 73-80).

Perkawinan campuran yang ada di Desa Patoman dilatar belakangi oleh beberapa factor, yaitu karena ada kesamaan pekerjaan; tempat tinggal; Agama; budaya; dan etnis.

### 3. Ideologi Pancasila

Keberhasilan pengelolaan kemajemukan dan kemultikulturan masyarakat di Desa Patoman tidak bisa dilepaskan dari peran strategis ideologi pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Menurut Shadily (1993: 303) menjelaskan bahwa “filsafat Pancasila adalah dasar ampuh untuk menyuburkan kerja sama antara suku dan golongan-golongan yang ada di Indonesia menuju kesatuan dan harmoni”. Lebih lanjut dijelaskan oleh Nasikun (2015: 77-78) pada hakikatnya Pancasila merupakan:

“...pernyataan bersama dari berbagai komponen masyarakat Indonesia untuk mempersemaikan toleransi dan akomodasi timbal balik yang bersumber pada pengakuan akan kebhinekaan masyarakat Indonesia. Pancasila meliputi toleransi dan akomodasi timbal balik dalam bidang kesukuan, keagamaan, kedaerahan, dan pelapisan sosial. Pancasila pada hakikatnya merupakan perumusan tekad bersama bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan bersama bangsa Indonesia di atas dasar cita-cita Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia”.

Oleh karena itu, Pancasila telah menjadi salah satu faktor penting yang mengintegrasikan masyarakat Desa Patoman dengan segala kekhasan perbedaannya. Jika meminjam istilah Nengah Bawa Atmadja (2010: 395) “Pancasila merupakan rumah bagi kemultikulturan”, artinya bahwa Pancasila sebagai suatu pernyataan bangsa yang memuat kesepakatan masyarakat tentang pengakuan adanya pluralitas atau multikulturalitas. Gagsan tersebut sejalan dengan penjelasan Yewangoe (dalam Atmadja, 2010: 395) yang menyatakan bahwa “Pancasila adalah rumah bersama, yang di dalamnya kita semua, apapun agama dan sukunya, tinggal bersama-sama”. Berkenaan dengan itu maka dalam pandangan Falsafah dan Ideologi Pancasila semua warga negara sama kedudukannya, sama kewajiban dan sama haknya, tanpa diskriminasi, tanpa membedakan agama, suku, ras, etnik, mayoritas dan minoritas.

Wujud nyata sumbangan ideologi Pancasila dalam membina hubungan harmonis antarumat beragama di Desa Patoman dapat diketahui dari penjabaran makna Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dijadikan patokan oleh masyarakat Desa Patoman dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bung Karno sila ini dimplementasikan dengan cara bangsa Indonesia harus berjuang membangun bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi pengikat batin bangsa Indonesia untuk bersatu dengan kokoh, sehingga sila ini menjadi meja statis bagi rakyat



Indonesia dan menjadi *leitstar* dinamis, yaitu menjadi bintang pembimbing bangsa Indonesia untuk membangun suatu bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi penting kedudukannya mengingat kehidupan beragama di Desa Patoman sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan, lebih jauh lagi masyarakat Desa Patoman merasakan kehidupan beragama tersebut harus diperjuangkan untuk terus berkembang secara baik. Oleh karena agama-agama yang dipercayai oleh masyarakat Desa Patoman tidak satu, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan bimbingan kepada seluruh masyarakatnya untuk menanta kehidupan secara beradab dan toleran.

Bung Karno memberikan penjelasan mengenai sikap keberagaman bangsa Indonesia, yang mesti dibangun dan dibina dengan:

*“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya”* (Basarah, 2017: 142).

Bukan hanya bangsa Indonesia itu harus bertuhan, tetapi Negara Indonesia pun harus bertuhan. Sebab menurut keyakinan Bung Karno semua makhluk yang hidup di dunia bertuhan demikian juga dengan Negara, seperti dijelaskan:

*“Hendaknya negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara leluasa. Segenap rakyat bertuhan secara kebudayaan, yakni tidak “egoism agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan”* (Basarah, 2017: 143).

Perjalanan bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang sangat menjunjung jiwa toleransi yang tinggi. Sikap ini sudah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi pembimbing bagi masyarakat Desa Patoman untuk menjalani kehidupan beragama dengan berbudi pekerti luhur, hormat-menghormati satu sama lain. Atas uraian pemikiran sila Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Bung Karno, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasarnya dapat dijabarkan menjadi empat prinsip, yaitu:

- a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan;
- b. Pada prinsipnya, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa;
- c. Pada prinsipnya segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama; dan
- d. Pada prinsipnya, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, berkeadaban, dengan sikap saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan (Basarah, 2017: 144).

Pengejawantahan Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara tertuang secara eksplisit dalam visi Desa Patoman, yaitu *“Membangun Kebersamaan Masyarakat Desa Patoman Dengan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam Menuju Masyarakat Yang Rukun, Aman Dan Sejahtera Sesuai Dengan Tujuan Pembangunan Masyarakat Seutuhnya”*. Perbedaan yang ada pada masyarakat di Desa

Patoman tidaklah menjadikan mereka hidup dalam ketegangan yang menimbulkan konflik, seperti konflik-konflik yang sering terjadi dewasa ini yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama, etnis, suku dan kelompok, namun kehidupan mereka justru sangat harmonis, bisa hidup secara berdampingan, dan sangat menjunjung toleransi dan kerukunan antar agama dan suku. Setiap masyarakat bukan hanya mengakui keberadaan hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan dari setiap masing-masing penganut agama yang ada melalui interaksi positif dalam lingkungan masyarakat yang plural dan mejemuk.

#### 4. Kerukunan dari Sudut Pandang Agama Islam

Kerukunan antarumat beragama di Desa Patoman tidak dapat dilepaskan dari visi agama islam tentang toleransi. Toleransi atau penghargaan terhadap perbedaan dalam beragama secara substansial menyatu dengan agama Islam. Gagasan tersebut dapat dicermati dalam kutipan sebagai berikut.

“Berangkat dari diktum “tidak ada paksaan dalam beragama” dan “Nabi memang melarang memaksa pihak lain untuk beriman” maka jalan yang terbaik dan sah bagi seorang Muslim dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengembangkan kultur toleransi. Karena Al-Qur’an menguatkan adanya eksistensi keberbagaian suku, bangsa, agama, bahasa, dan sejarah, semuanya itu hanya mungkin hidup dalam harmonis, aman, dan damai, jika di sana kultur lapang dada dijadikan perekat utama. Sikap lapang dada harus muncul dari kepercayaan diri yang tinggi, bukan dari suasana batin yang tidak berdaya. Mereka yang percaya diri tidak mungkin gampang melihat perbedaan, betapapun tajamnya, asal senantiasa dicarikan solusi bersama untuk mengatasinya” (Maarif, 2009: 177).

Betapa kuatnya asas toleransi yang berlaku dalam Islam bisa dicermati pada piagam Madinah. Konsep mengenai Piagam Madinah merupakan contoh bahwa yuridis formal, Nabi Muhammad SAW, justru mengakui dan melindungi terhadap pemeluk agama lain. Di dalam suatu negara ada kewajiban yang harus saling diemban dan juga hak yang sama-sama diperoleh sebagai sesama warga Negara. Konsep ini memiliki relevansi dengan kehidupan manusia yang memang plural dalam banyak aspek. Mengingkari pluralisme hakikatnya adalah mengingkari Sunnatullah yang memang Allah menciptakan manusia di dalam kategori bersuku, beretnis atau berbangsa yang berbeda-beda.

Dalam ajaran agama Islam menganjurkan manusia untuk saling bekerjasama dan tolong menolong (*ta’awun*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan dalam kehidupan social kemasyarakatan dengan siapa saja tanpa terbatas oleh ras, suku, agama, dan bangsa (Suryana, 2011: 128; Muhammad Chirzin, 2007: 1-13). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hubungan sosial dalam ajaran agama Islam dapat terjadi dalam lingkungan intern maupun lingkungan ekstern. Dalam lingkungan intern atau antar pemeluk agama Islam sendiri dapat dilihat pada beberapa konsep seperti *ukhuwah* (persaudaraan) dan jamaah. *Ukhuwah* sendiri dalam ajaran islam terdiri dari *ukhuwah ubudiyah* (saudara sekemakhlukan dan kestenudukan kepada allah), *ukhuwah insaniyah* (saudara dengan seluruh manusia karena berasal dari ayah dan ibu yang sama; Adam dan Hawa), *ukhuwah wathaniah wannasab* (persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan), *ukhuwah fid din al islam* (persaudaraan sesama muslim) (Suryana, 2011: 129).

Selain mengajarkan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim, agama Islam juga mengajarkan bagaimana mengajarkan bagaimana menjalin

hubungan yang harmoni dengan umat agama lain. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diungkapkan dalam Alquran QS.49:13:

Wahai seluruh umata manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan mengenal (Suryana, 2011: 132; Muhammad Chirzin. 2007: 1-13).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa agama Islam bersifat universal dalam artian tidak membedakan antara agama, ras, suku, dan bangsa. Bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan toleransi kepada setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ide tentang kemajemukan ini merupakan prinsip dasar dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat toleran dan menghargai pendapat sesama umat Islam (intern umat Islam), yang didasari atas ukhuwah Islamiyah. Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan al-Qur'an dalam surat al-Hujurat/49: 11 yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan)*" (Sirajuddin Zar, 2013: 73)." Lebih lanjut dalam surat Ali Imran/3: 64 dijelaskan kerukunan hidup umat Islam terhadap umat-umat agama lain, sebagai berikut.

"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Sirajuddin Zar, 2013: 74)

Dalam surat al-Maidah/ 5: 48 dijelaskan juga mengenai keragaman dan toleransi yang berbunyi "*Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu kembali semuanya, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah perselisihkan itu*" (Muhammad Chirzin. 2007: 1-13).

Dalam Islam tidak dibenarkan memaksakan kebenaran kepada umat agama lain (QS. al-Baqarah: 256). Ajaran Islam melarang umatnya mempengaruhi siapapun untuk masuk Islam, apalagi dalam bentuk tekanan-tekanan sosial dan politik. Umar bin Khattab sering mempengaruhi budaknya, Astiq non-Islam untuk menerima Islam. Akan tetapi ketika budaknya menolak, Umar hanya dapat berucap: la ikraha fi al-din (tidak ada paksaan dalam agama Islam).

Jika diamati dalam pola kehidupam masyarakat Desa Patoman khususnya yang beragama Islam secara tidak langsung mereka sudah menerapkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang tertulis di atas. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Patoman yang hidup rukun, damai, dan berseri-seri jauh dari adanya konflik. Kerukunan dalam masyarakat desa Patoman tidak hanya sebatas pada interumat beragama semata, tetapi juga pada tataran antarumat beragama.



## 5. Kerukunan Dari Sudut Pandang Agama Hindu

Potret kerukunan antarumat beragama di Desa Patoman jika dilihat dari perspektif ajaran agama Hindu, misalnya terlihat pada ajaran *tat twam asi* dan *ahimsa* (nirkekerasan). *Tat twam asi* menekankan pada persaudaraan universal, dengan asumsi bahwa secara substansial manusia adalah bersaudara secara ketubuhan (bahan baku *Panca Mahabuta*) dan di dalamnya terdapat *atman* sebagai percikan Tuhan (*Brahman*) (Atmadja, 2010: 372-373). *Ahimsa* adalah larangan untuk melakukan kekerasan atau *himsa* dalam pikiran, ucapan dan tindakan (Atmadja, 2010: 373).

Kedua konsep di atas melandasi kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Desa Patoman karena *tat twam asi* yang menekankan pada gagasan kita adalah bersaudara, menimbulkan implikasi, bahwa *ahimsa* menjadi wajib diterapkan pada semua manusia, tanpa membedakan agama, etnisitas, kelas sosial, dan lain-lain. Jika seseorang melakukan *himsa* pada orang lain, berarti dia melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Sebab, kita adalah bagian dari mereka sehingga secara substansial kita adalah mereka, dilihat dari segi petampakan ketubuhan bisa berbeda, namun secara substansial kita adalah sama sehingga pengembangan hubungan berkesaudaraan wajib hukumnya (Atmadja, 2010: 373).

Latar belakang kerukunan dan toleransi di Desa Patoman berakar pula pada ideologi *Tri Hita Karana*. konsep *Tri Hita Karana* yang terdiri dari *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan* (Suparman, 2003 : 133; Widana, 2006:53; Pitana, 1994 : 148; Santeri, 2005 : 84). Secara etimologi *Tri Hita Karana* adalah tiga unsur penyebab kebahagiaan yang mengajarkan tentang keserasian, keselarasan dan keseimbangan (Manuaba, 1999: 61; Sudibia, 1994: 98). Jadi *Tri Hita Karana* dapat diartikan sebagai tiga hubungan harmonis yang mengandung filsafat keselarasan, keserasian dan keseimbangan yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam lingkungannya (Atmadja, 2006: 17; Kerepun, 2005:62; Nida, 2004: 53, Partia, 1996: 7; Putra, 2003: 119; Santeri, 2000: 115). Dalam kaitannya untuk menjaga lingkungan hidup unsur *palemahan* menjadi unsur yang sangat penting untuk melestarikan lingkungan.

Kondisi ini mengakibatkan orang Bali mendapatkan pemahaman, bahwa hubungan harmonis antara tiga komponen, yaitu manusia, alam, dan kekuatan adikodrati merupakan persyaratan penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Gagasan inilah yang melahirkan ideology *Tri Hita Karana* yang menggariskan, bahwa kesejahteraan hidup manusia tergantung pada sejauh mana manusia bisa berhubungan harmonis dengan alam yang disebut *Palemahan*, berhubungan harmonis dengan sesama manusia yang disebut *Pawongan*, dan berhubungan harmonis dengan kekuatan adikodrati (Tuhan) yang disebut *Parahyangan*. *Pawongan* tidak hanya menyangkut hubungan harmonis dengan sesama orang Bali Hindu, tetapi bisa pula diimplementasikan dengan orang non-Bali dan non-Hindu atau orang Islam, Buddha, Kristen yang hidup pada ruang yang sama di Desa Patoman (Atmadja, 2010: 373).

Gagasan tersebut diperkuat lagi dengan dalil *desa* (keruangan/ekosistem), *kala* (kewaktuan/kesejarahan), dan *patra* (kreativitas manusia menjawab kondisi yang mereka hadapi). Dalil *desa*, *kala*, *patra* tidak bisa dilepaskan dengan ideologi *Tri Hita Karana*. Keberlakuan dalil *desa*, *kala*, *patra* mengakibatkan orang Bali mengakui adanya relativisme kebudayaan dalam konteks aplikasi ideologi *Tri Hita Karana*. Jika suatu desa (kampong, *bajar*, dusun dalam suatu desa) memiliki kebudayaan yang berbeda, karena agama yang dianutnya berbeda, misalnya ada yang menganut agama Islam, Kristen, Buddha maka perbedaan tersebut harus dihormati, tidak saja karena sesuai dengan asas

*desa, kala, patra*, tetapi juga untuk mewujudkan sasaran ideologi *Tri Hita Karana*, yakni menciptakan masyarakat yang harmonis.

Penerimaan terhadap perbedaan terkait pula dengan konsep *rwa bhineda*. Konsep ini menekankan pada dua hal berbeda dan bersifat dikotomik sebagai suatu keniscayaan yang harus diterima oleh semua manusia, misalnya Barat-Timur, Utara-Selatan, Pusat-Pinggiran. Dalam konteks ini, hubungan antara orang Hindu dengan Islam, Buddha dan Kristen di Desa Patoman atau “kita dan mereka”, bukan dilihat sebagai hubungan antara kawan dan lawan, melainkan diposisikan sebagai hubungan antara kosmis dan pinggiran. Sesuai dengan asas *rwa bhineda*, maka orang Hindu yang berada pada posisi pinggiran tidak boleh meniadakan orang Islam yang berada pada posisi pusat kosmis, begitu pula sebaliknya. Sebab, kebermaknaan agama Hindu dan kebudayaan Bali (orang Bali) pada posisi pinggiran tidak bisa dilepaskan dari agama Islam pada posisi pusat kosmis. Pendek kata menurut asas *rwa bhineda*, keberagaman yang ada di masyarakat harus dikelola ke arah *Bhineka Tunggal Ika*, caranya dengan bukan dengan memperkuat paham kekitaan dan kemerekaan, tetapi mendialektikan hubungan antara kita dan mereka secara bermakna.

## 6. Kerukunan dari Sudut Pandang Agama Budha

Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, sang Buddha menganjurkan “terdapat enam Dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari perpecahan, yang akan menunjang kerukunan persatuan dan kesatuan. Keenam Dharma itu adalah:

- a. Memancarkan cinta kasih (*metta*) dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan dan kerukunan dan persatuan akan terwujud.
- b. Menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etiket baik, tak menyebarkan isu, gossip dan fitnahan.
- c. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka.
- d. Menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial.
- e. Melaksanakan moral (*sila*), etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat. Tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain.
- f. Mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan (Chowmas, 2009: 157-158).

Ajaran agama Buddha yang bersumber dari Sang Buddha bersifat inklusif dan terbuka dengan metode “*ehipassiko*” yang berarti “datang lihat dan buktikan”, bukannya berdasar pada kepercayaan yang membabi buta, tetapi dengan keyakinan yang telah dibuktikan (Sumbulah dan Nurjanah, 2013: 73). Hal ini diperjelas dalam *Digha Nikayam Kalama Sutta*:

“...oleh karena itu, warga suku Kalama, janganlah percaya begitu saja berita yang disampaikan kepadamu, atau oleh karena sesuatu yang sudah merupakan tradisi, atau sesuatu yang sudah disesatkan. Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci, juga apa yang dikatakan sesuai logika atau kesimpulan belaka, juga apa yang dikatanya telah direnungkan dengan seksama, juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu atau karena ingin menghormati seorang petapa yang menjadi gurumu ...tetapi terimalah kalau engkau sudah membuktikannya sendiri” (Sumbulah dan Nurjanah, 2013: 73-74).

Adapun inti ajaran agama Buddha yang termuat dalam *Khuddhaka Nikaya*, *Khuddhaka Patha*, *Dhammapada* 183 adalah *Sabbapapasaakaranang*, *Kusalasaupasampada*, *Saccitaparoyodapang* (Terjemahan: tidak melakukan kejahatan, perbanyak berbuat kebajikan, serta sucikan hati dan pikiran) (Suwono, 2008: 19-22). Kepedulian terhadap lingkungan sosial merupakan salah satu wujud dari keimanan Buddhisme. Membangun sosial kemasyarakatan merupakan salah satu cita-cita kesejahteraan manusia, yang pada akhirnya dapat membawa kesejahteraan bagi negara dan bangsa.

Buddha mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak melarikan diri dari kenyataan-kenyataan hidup yang wajar, melainkan mendorong mereka untuk dapat menghargai dan memecahkan dengan usaha sendiri. Seorang Buddhis yang baik tidak akan berpaling dari setiap masalah kemasyarakatan. Pengikut Buddha juga tidak menolak untuk bekerja demi kebaikan umum. Menurut Sumbulah dan Nurjanah (2013: 75-76), ada dua prinsip pandangan Buddhis, yaitu:

“...pertama, kehidupan tidak dapat lepas dari saling berhubungan, saling bergantung, dan kerja sama. Bagi seorang yang baik, kepentingan orang lain sama pentingnya dengan kepentingan sendiri. Sang Buddha bersabda: “...orang yang memperhatikan kepentingan orang lain di samping kepentingannya sendiri adalah yang terbaik” (Anggutara Nikaya, 11: 95; Digha Nikaya, III: 223. Kedua, seseorang tidak akan dapat menolong orang lain sebelum ia menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu, hendaknya ia mengembangkan dirinya sifat-sifat yang memungkinkan dapat menjadi sumber kebaikan dan pertolongan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Hal ini sebagaimana dalam Sabda Sang Buddha: “tidak mungkin orang yang terperosok ke dalam lumpur dapat menarik orang lain dari lumpur. Hanya orang yang telah bebas dari lumpur...”.

Kemudian, dalam perspektif agama Buddha, satu adalah semua dan semua adalah satu. Apapun yang dilakukan oleh seseorang baik atau buruk, akan dapat mempengaruhi masyarakat dan alam sekitar, karena semuanya adalah satu keseluruhan. Oleh karena itu, jika seseorang menginginkan kebahagiaan hidup, maka sesungguhnya itu bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan secara bersama-sama untuk seluruh masyarakat, bersama-sama dalam kebahagiaan atau penderitaan, karena alam semesta terikat pada hukum ketergantungan.

Pandangan yang demikian menghasilkan suatu prinsip moral sosial, yang melihat kepentingan orang lain dalam kepentingan diri sendiri. Orang yang menjalankan prinsip-prinsip moral sosial ini disebut “orang yang baik dan berharga”. Orang yang baik dan berharga ini tidak pernah berfikir akan mencelakakan orang lain maupun diri sendiri, sebaliknya ia akan selalu memikirkan bagaimana mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri dan umat manusia. Ia juga akan berusaha membantu orang lain untuk berbuat kebaikan. Ia juga akan menonjolkan diri sendiri dan meremehkan orang lain, menghormati dan menyokong mereka yang mau menjalankan kebernarannya (*dharma*) (Suwono, 2008: 3).

Sejarah perjalanan Buddha dalam menyiarkan ajarannya selama 45 tahun, nyatanya juga belum pernah terjadi bentrokan antar para pemeluk agama. Hal ini karena Sang Buddha menjunjung prinsip dan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dengan adanya prasasti Kalingga No. XXII dari raja Asoka pada abad ke-3 SM, yang isinya sebagai berikut ini.

“...janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lainpun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri, untuk perkembangan di samping menguntungkan pula orang lain. Dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan agama kita sendiri, di samping merugikan agama orang lain, orang karena barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata karena didorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan berfikir “bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri” (Sumbulah dan Nurjanah, 2013: 77-78).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif agama Buddha, jika seseorang berbuat kejahatan, misalnya dengan mencela orang lain, atau agama orang lain maka sesungguhnya perbuatan tersebut justru amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunan dan toleransis yang dianjurkan Sang Buddha adalah dalam pengertian bahwa semua orang hendaknya mau mendengar dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut orang lain (saling hormat menghormati).

## 7. Kerukunan dari Sudut Pandang Agama Kristen

Dalam ajaran agama Kristen juga ditemui konsep tentang kerukunan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap, Gereja terhadap, agama-agama lain didasarkan pada asal kisah rasul-rasul 17: 26 sebagai berikut: “Adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun satu juga, karena Tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi.”

Dalam bagian lain dari Mukadimah Deklarasi tersebut disebutkan: "Dalam zaman kita ini, di mana bangsa, manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan antara bangsa menjadi kokoh, gereja lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama-agama Kristen lain. Karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia dan juga di antara para bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk hidup berkawan."

Deklarasi konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama, yakni "Kasihlanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap, hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihlanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Isi deklarasi di atas menggambarkan bagaimana bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakannya mesti mereka berlainan agama. Sikap saling hormat-menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan

## KESIMPULAN

Latar belakang kerukunan antar umat beragama di Desa Patoman, Blimbingsari, Banyuwangi meliputi: 1) Latar belakang sejarah; 2) Perkawinan; 3) Nilai-nilai Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika; 4) Ajaran Agama Islam tentang Toleransi; 5) Nilai-nilai filosofi ajaran agama Hindu beserta dengan nilai-nilai kearifan lokalnya; 6) Nilai-nilai ajaran agama Budha dengan Dharma-nya; dan 7) Ajaran Agama Kristen dengan cinta kasihnya.

Pada dasarnya dengan kesadaran beragama yang dimiliki oleh setiap masyarakat Desa Patoman dengan memandang semua ajaran tersebut memiliki tujuan yang sama sehingga menimbulkan rasa toleransi, simpati, dan empati tidak hanya antar umat beragama tetapi antar umat beragama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Nengah Bawa. 2006. *"Kearifan Lokal dan Agama Pasar"*, dalam *Media Komunikasi Sejarah Lokal Candra Sangkala Bali dalam Perspektif. Edisi Khusus Diterbitkan dalam Rangka Purnabakti Drs. Made Sunada*. IKIP Negeri Singaraja.
- Basarah, Ahmad. 2017. *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Pers (Konpress).
- Bungin, H. M. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chowmas, Dharmaji. 2009. *Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Agama Buddha*. Jurnal Toleransi, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2009. Halaman 156-167.
- Kardiyan. 2015. *Setengah Abad Amalgamasi Antara Etnis Jawa Dengan Etnis TTempatan Di Desa Siabu, Salo, Kampar*. Jom FISIP Volume 2, No. 2 Edisi Oktober 2015. Hlm. 1-14.
- Muhammad Chirzin. 2007. *Ukhuwah dan Kerukuan Dalam Perspektif Islam*. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu agama, Vol VIII, No. 1, Edisi Juni 2007. Hlm. 1-13.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 2013. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nida, Diartha. 2004. *Sinkretisasi Siwa-Buddha di Bali : Kajian Historis Sosiologi*. Denpasar : BP.
- Nikmah, Hilda Yuwafi. 2015. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional*. Privat Law Edisi 06 November 2014-2015. Hlm. 73-80.
- Pageh, I Made, dkk. 2013. *Model Integrasi Masyarakat Multi Etnik Nyama Bali-Nyama Selam: Beleajar dari Enclaves Muslim di Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Partia, I Gusti Rai. 1996. *Menyorot Aneka Masalah Umat Hindu*. Denpasar : Yayasan Dharma Naradha.
- Pitana, I Gede. 1994. *"Desa Adat dalam Arus Modernisasi"*, dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali ( Editor: Pitana)*. Denpasar : Bali.
- Putra, I Made Ardana. 2003. *"Tri Hita Karana di Antara Teori dan Aplikasi"*, dalam *Perempatan Agung : Menguak Konsepsi Palembang Ruang dan Waktu Masyarakat Bali (Editor: Jiwa Atmaja)*. Denpasar : CV Bali Media Adhikarsa.
- Rangkuti, Sofia dan Hasibuan. 2002. *Manusia Indonesia dan Kebudayaan di Indonesia: Teori dan Konsep*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Samuel, Hanneman. 2010. *The Development of Sociology in Indonesia: The Production of Knowledge, State Formation, and Economic Change "Dari Kolonialisme Belanda Hingga Modernisasi Amerika"*. Penerjemah dan Penyunting: Geger Riyanto. Depok: Kepik Ungu.



- Santeri, Raka. 2000. *Tuhan dan Berhala: Sebuah Perjalanan dalam Hindu*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Santeri, Raka. 2005. "Struktur Sosial Masyarakat Bali", dalam *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad (Penyunting : Putu Setia)*. Denpasar : Yayasan Dharma Naradha.
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sirajuddin Zar. 2013. Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam. *Jurnal Toleransi*, Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013. Hlm. 71- 74.
- Sudibya, I Gede. 1994. *Hindu : Menjawab Dinamika Zaman*. Denpasar : BP.